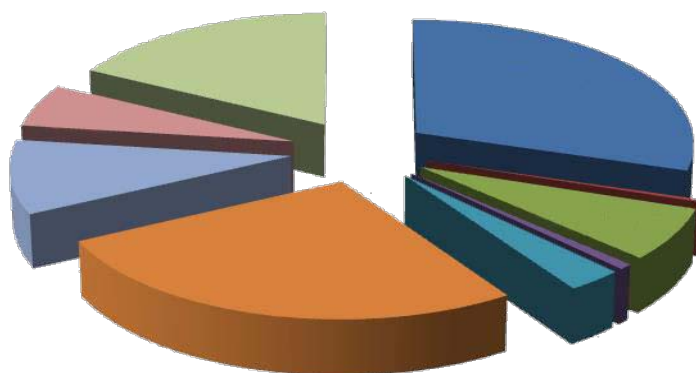




PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN I

TAHUN 2017



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

**PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN CIAMIS
TRIWULAN I TAHUN 2017**

Ukuran Buku : 27,5 cm x 20,5 cm
Jumlah Halaman : 46 + iv halaman

Penyusun :

**Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
Kabupaten Ciamis**

Diterbitkan oleh :

**Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
Kabupaten Ciamis**

Desain Cover :

**Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
Kabupaten Ciamis**

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas kehendak-Nya Buku Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 telah selesai disusun.

Publikasi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 merupakan publikasi kelima dengan Tahun Dasar Baru (2010 = 100) melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis.

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 merupakan referensi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis khususnya yang berkaitan dengan indikator ekonomi makro.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 ini, semoga bermanfaat.

Ciamis, Mei 2017

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ciamis**



**AEF SAEFULOH, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671110 199703 1 008**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan ..	4
1.4. Ruang Lingkup	5
BAB II METODOLOGI	22
2.1. Metodologi Survei	22
2.1.1. Rancangan Sampel Survei Perekonomian Daerah Triwulanan	22
2.2. Sistematika Lapangan	22
2.3. Indeks Berantai	23
2.3.1. Indeks Volume Produksi	23
2.3.2. Indeks Volume Penjualan	24
2.3.3. Indeks Harga	25
2.3.4. Indeks Tenaga Kerja	26
2.4. Aplikasi Survei Ekonomi Daerah (SED) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha	27
2.4.1. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	27
2.4.2. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	28
2.5. Cakupan	28
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30
3.2. Kategori Pertambangan dan Penggalian	32
3.3. Kategori Industri Pengolahan	32
3.4. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas	33
3.5. Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33
3.6. Kategori Konstruksi	33

3.7. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34
3.8. Kategori Transportasi dan Pergudangan	34
3.9. Kategori Akomodasi dan Makan Minum	34
4.0. Kategori Informasi dan Komunikasi	35
4.1. Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi.....	35
4.2. Kategori Real Estate	35
4.3. Kategori Jasa Perusahaan	35
4.4. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36
4.5. Kategori Jasa Pendidikan	36
4.6. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36
4.7. Kategori Jasa Lainnya	36
BAB IV KESIMPULAN	38

LAMPIRAN
TABEL-TABEL

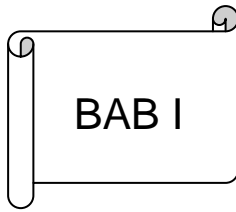
Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	39
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	40
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)	41
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	42
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)	43
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	44
Tabel 7. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Menurut Lapangan Usaha (2010=100)	45
Tabel 8. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Menurut Lapangan Usaha (2010=100) (Persen)	46

1

PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era otonomi daerah menuntut daerah secara otonom harus mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pembangunan ekonomi dan sosial menjadi hal krusial yang harus diperhatikan. Potret Pembangunan yang baik berawal dari perencanaan yang baik.

Perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Ciamis memerlukan data Statistik yang akurat untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di Kabupaten Ciamis tepat sasaran dan perkembangan ekonomi Kabupaten Ciamis dapat dimonitor dan dievaluasi secara baik.

Salah satu strategi pembangunan di Kabupaten Ciamis diarahkan pada peningkatan lapangan kerja, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sehingga akses terhadap faktor produksi semakin baik pula untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis. Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada bidang-bidang yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 secara umum masih bertumpu kepada kategori dominan antara lain Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 26,56 persen; urutan kedua adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 21,78 persen, serta urutan ketiga adalah Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 13,95 persen. Ketiga kategori ini memberi kontribusi sebesar 62,28 persen. Dengan demikian apabila fokus pembangunan di Kabupaten Ciamis diarahkan pada ketiga kategori tersebut, maka

akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kinerja perekonomian secara keseluruhan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan I Tahun 2017 lebih lambat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2016 yaitu sebesar 0,19 persen. Hal ini dikarenakan menurunnya produksi pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, menurunnya produksi pada Kategori Industri Pengolahan, menurunnya produksi pada Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, menurunnya produksi pada Kategori Konstruksi, menurunnya produksi pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menurunnya produksi pada Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, serta menurunnya produksi pada Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Kategori di Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 (Persen)

Kategori	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,38	26,56
2. Pertambangan dan Penggalian	(5,41)	0,13
3. Industri Pengolahan	(6,06)	7,25
4. Pengadaan Listrik dan Gas	(13,51)	0,09
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,60	0,03
6. Konstruksi	(9,14)	6,62
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(1,19)	21,78
8. Transportasi dan Pergudangan	0,07	13,95
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	3,94
10. Informasi dan Komunikasi	1,39	2,49
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	(1,77)	3,39
12. Real Estate	4,73	2,86
13. Jasa Perusahaan	0,78	0,78
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(6,32)	3,50
15. Jasa Pendidikan	1,18	4,40
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,20	0,84
17. Jasa lainnya	0,28	1,40
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,19	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (Diolah)

Untuk memotret dinamika ekonomi regional secara berkesinambungan maka dilaksanakan **Penyusunan Buku Perkembangan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Ciamis Tahun 2017**. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengadakan Survei Ekonomi Daerah (SED) Triwulanan Tahun 2017 dengan referensi waktu triwulanan, dimana angka pada triwulan berjalan merupakan angka sangat sementara dan triwulan sebelumnya merupakan angka perbaikan walaupun angkanya masih merupakan angka sementara. Hal ini dikarenakan angka perbaikan murni bersamaan dengan diterbitkannya angka sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahunan dengan harapan angka hasil Survei Ekonomi Daerah (SED) Triwulanan Tahun 2017 dapat mencerminkan keadaan ekonomi makro Kabupaten Ciamis sehingga angka tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan terutama oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Ciamis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Buku Perkembangan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 dimaksudkan untuk mendapatkan data beberapa indikator ekonomi serta memprediksi perkembangan pembangunan pada masa datang, terutama pembangunan jangka pendek (*short time*) dengan tujuan untuk melihat keadaan makro ekonomi triwulanan.

1.3. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan

Kegunaan kegiatan Penyusunan Buku Perkembangan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 antara lain :

1. Untuk mengetahui keadaan beberapa indikator ekonomi.
2. Sebagai salah satu bahan penghitungan estimasi Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan.
3. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perencanaan dan kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Untuk mengetahui struktur ekonomi wilayah Kabupaten Ciamis.
5. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis.

1.4. Ruang Lingkup

Survei Ekonomi Daerah (SED) Triwulanan Tahun 2017 mencakup semua kategori kegiatan ekonomi. Dasar pemilihan responden adalah prioritas usaha yang cukup dominan dalam menyumbangkan nilai tambahnya, oleh karena itu responden meliputi baik perusahaan milik pemerintah berupa BUMN maupun BUMD serta perusahaan swasta.

Pelaksanaan Survei Ekonomi Daerah (SED) Triwulanan Tahun 2017 meliputi semua kategori yang mencakup seluruh sub kategori-sub kategori pendukungnya.

Kegiatan usaha yang dicakup dalam Survei Ekonomi Daerah (SED) Triwulanan Tahun 2017 ini antara lain :

1.4.1. Kategori A : PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

1). Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll).

Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih

termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain : padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

b. Tanaman Hortikultura

Sub kategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman.

Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

c. Tanaman Perkebunan

Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

d. Peternakan

Sub kategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Sub kategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan

peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi `kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

2). Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sub kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang

menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

3). Perikanan

Sub kategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi System Of National Accounts (SNA 2008).

Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*.

Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan *Cultivated Biological*

Resurces (CBR) atau *Work-in-Progress (WIP)* dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu sub kategori diperoleh dari penjumlahan Nilai Tambah Bruto (NTB) tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*). Estimasi Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi ditahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

1.4.2. Kategori B : PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu : pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Untuk Kabupaten Ciamis yang ada adalah Sub kategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

1). Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sub kategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian.

1.4.3. Kategori C : INDUSTRI PENGOLAHAN

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

1.4.4. Kategori D : PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

1.4.5. Kategori E : PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) untuk pengadaan air Tahun Dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun.

1.4.6. Kategori F : KONSTRUKSI

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain : Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal : jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi : pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil : instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan : meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan alumunium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

1.4.7. Kategori G : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

1). Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Sub kategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2). Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Sub kategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir *dalam* pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini.

1.4.8. Kategori H : TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang terjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas : angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti : terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

1.4.9. Kategori I : PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

1.4.10. Kategori J : INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga

data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom, buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

1.4.11. Kategori K : JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

1). Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti : mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya.

Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

2). Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

a. Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

b. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

3). Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Sub kategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

a. Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai

jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

b. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. **Sewa guna usaha dengan hak opsi** mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. **Pembiayaan kartu kredit** mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. **Pembiayaan anjak piutang** mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

c. Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

4). Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Sub kategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

1.4.12. Kategori L : REAL ESTATE

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate serta penyediaan jasa real estate lainnya bisa

dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah property berupa tanah dan bangunan.

1.4.13. Kategori M dan N : JASA PERUSAHAAN

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain : jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya.

Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain : jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

1.4.14. Kategori O : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh

Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

1.4.15. Kategori P : JASA PENDIDIKAN

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan.

Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

1.4.16. Kategori Q : JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktek Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

1.4.17. Kategori R, S, T, U : JASA LAINNYA

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009). Kategori ini mempunyai kegiatan yang

cukup luas yang meliputi : Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

a. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009). Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

b. Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

c. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009), mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

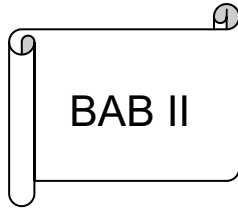
d. Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

2

METODOLOGI





METODOLOGI

2.1. Metodologi Survei

2.1.1. Rancangan Sampel Survei Perekonomian Daerah Triwulanan

Metode pengambilan sampel dalam survei ini adalah *Purposive Sampling*, dengan terlebih dahulu menentukan jumlah perusahaan pada masing-masing kategori kegiatan ekonomi. Penentuan alokasi jumlah sampel masing-masing kategori dilakukan secara *proporsional*, yaitu sesuai dengan besarnya peranan Nilai Tambah Bruto (NTB) kategori tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penentuan perusahaan sebagai responden dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan tersebut cukup besar dan memiliki catatan yang lengkap.
- b. Mampu mengisi daftar isian Survei Ekonomi Daerah (SED) yang lengkap dan cepat.

Dengan kriteria tersebut diharapkan dapat mewakili kegiatan Penyusunan Buku Perkembangan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

2.2. Sistematika Lapangan

Jumlah sampel perusahaan/usaha dalam kegiatan Survei Ekonomi Daerah (SED) yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis adalah 1.645 responden yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis dengan petugas pencacah sebanyak 20 orang dan pengawas sebanyak 8 orang.

Untuk menyamakan persepsi atas konsep dan definisi dari setiap isian kuesioner, maka dilakukan pelatihan petugas lapangan baik tenaga pencacah maupun tenaga pengawas. Dari hasil pencacahan kemudian dilakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap isian kuesioner dan jika diperlukan dilakukan pengecekan/supervisi ke

lapangan sebagai bahan koreksi terhadap kewajaran daftar isian yang telah diisi oleh petugas lapangan.

2.3. Indeks Berantai

Indeks Berantai merupakan perbandingan dari nilai pada tahun berjalan (t) dibagi dengan tahun sebelumnya (t-1) dikalikan seratus. Nilai ini menggambarkan persentase tingkat perubahan.

Rumus Indeks Berantai

$$I_{(t,t-1)} = \frac{X_t}{X_{t-1}} \times 100$$

dimana :

- $I_{(t,t-1)}$: Indeks tahun t
- X_t : Nilai absolut tahun ke-t
- X_{t-1} : Nilai absolut tahun ke-t – 1

2.3.1. Indeks Volume Produksi

Indeks Volume Produksi adalah perbandingan dari volume produksi tahun berjalan (t) dibagi dengan tahun sebelumnya (t-1) dikalikan seratus.

Rumus Indeks Produksi

$$IP_{kt} = \frac{Q_{k,t}}{Q_{k,t-1}} \times 100$$

dimana :

- IP_{kt} : Indeks produksi komoditi 'k' pada triwulan 't'
- Q : Volume Produksi
- k : Komoditi
- t : Triwulan Berjalan (t = 1,2,3,4)
- $t - 1$: Triwulan Sebelumnya

Setelah diperoleh Nilai Indeks Produksi maka dapat dicari **Indeks Produksi Sub Kategori (IPS)** dengan cara sebagai berikut :

Rumus Indeks Produksi Sub Kategori (IPS)

$$IPS_{i,t} = \sum IP_{k,t} \times W_k$$

dimana :

$IPS_{i,t}$: Indeks Produksi Sub kategori 'i' pada Triwulan 't'

W_k : $\frac{O_k}{\sum O_k}$ di mana $\sum W_k = 1$

Nilai Indeks Produksi Sub kategori ini digunakan sebagai bahan Penghitungan nilai Kategori Kategori Pertambangan dan Penggalian, Kategori Industri Pengolahan serta Kategori Listrik, Gas dan Air Bersih.

2.3.2. Indeks Volume Penjualan

Indeks Volume Penjualan adalah perbandingan dari volume penjualan tahun berjalan (t) dibagi dengan tahun sebelumnya (t-1) dikalikan seratus.

Rumus Indeks Penjualan

$$IJ_{k,t} = \frac{Q_{k,t}}{Q_{k,t-1}} \times 100$$

Dimana :

$IJ_{k,t}$: Indeks Penjualan Komoditi 'k' pada Triwulan 't'

Q : Volume Penjualan

k : Komoditi

t : Triwulan Berjalan (t=1,2,3,4)

$t - 1$: Triwulan Sebelumnya

Setelah diperoleh Nilai Indeks Penjualan maka dapat dicari **Indeks Penjualan Sub kategori (IJS)** dengan cara sebagai berikut :

Rumus Indeks Penjualan Sub Kategori (IJS)

$$IJS_{i,t} = \sum IJ_{k,t} \times W_k$$

Di mana :

$IJS_{i,t}$: Indeks Penjualan Sub kategori 'i' Pada Triwulan 't'

W_k : $\frac{O_k}{\sum O_k}$ di mana $\sum W_k = 1$

Nilai Indeks Penjualan Sub Kategori ini digunakan sebagai bahan penghitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kategori yang menggunakan pendekatan Indeks Penjualan adalah Kategori Bangunan; Kategori Perdagangan, Hotel dan Restoran; Kategori Pengangkutan dan Komunikasi; Kategori Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Kategori Jasa-jasa.

2.3.3. Indeks Harga

Pada dasarnya Indeks Harga/Inflasi itu merupakan gambaran kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa.

Indeks Harga yang sering digunakan antara lain:

- a) Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- b) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yaitu Indeks yang mengukur harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.
- c) Indeks Harga Implisit (*Implicit Price Index*) yaitu perbandingan harga dari NTB berlaku dengan NTB konstan. Peningkatan Indeks Harga Implisit menggambarkan kenaikan tingkat inflasi dari sisi produsen.
- d) Indeks Harga berdasarkan Survei Ekonomi Daerah (SED) yaitu indeks yang diperoleh berdasarkan data hasil bagi nilai jual dengan volume jual setiap komoditi.

Inflasi merupakan salah satu indikator makro untuk memantau laju pertumbuhan ekonomi dari sisi harga, dengan demikian inflasi sangat penting karena menggambarkan perkembangan harga dari berbagai kategori.

Data mengenai harga diperoleh dari nilai penjualan dibagi dengan volume penjualan. Dalam survei ini Indeks Harga yang digunakan sebagai harga dasar perhitungan NTB adalah Indeks Implisit setiap kategori.

Rumus Indeks Harga

Indeks Harga dengan Pendekatan Indeks Harga Implisit sebagai berikut :

$$\Delta IH = \left(\frac{IHI_t}{IHI_{t-1}} - 1 \right) \times 100$$

dimana :

ΔIH : Perubahan Indeks Harga

IHI : Indeks Harga Implisit

t : Triwulan Berjalan ($t=1,2,3,4$)

Indeks Harga dengan pendekatan Nilai Jual sebagai berikut :

$$\Delta IH = \left(\frac{NJ_{k,t} / VJ_{k,t}}{NJ_{k,t-1} / VJ_{k,t-1}} - 1 \right) \times 100$$

dimana :

ΔIH : Perubahan Indeks Harga

NJ : Nilai Jual

VJ : Volume Jual Komoditi

k : Komoditi

t : Triwulan Berjalan ($t = 1,2,3,4$)

$t - 1$: Triwulan Sebelumnya

2.3.4. Indeks Tenaga Kerja

Indeks Tenaga Kerja adalah perbandingan dari jumlah tenaga kerja tahunan berjalan (t) dibagi dengan tahun sebelumnya ($t-1$) dikalikan dengan seratus.

Rumus Indeks Tenaga Kerja

$$ITK = \frac{JTK_t}{JTK_{t-1}} \times 100$$

dimana :

- ITK* : Indeks Tenaga Kerja
JTK : Jumlah Tenaga Kerja
t : Triwulan Berjalan (t=1,2,3,4)
t - 1 : Triwulan Sebelumnya

2.4. Aplikasi Survei Ekonomi Daerah (SED) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha

2.4.1. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan

Setelah diperoleh nilai **Indeks Produksi Sub kategori ($IPS_{i,t}$)** dan **Indeks Penjualan Sub kategori ($IJS_{i,t}$)** maka didapatkan nilai **NTBK per kategori** dengan rumus sbb :

$$NTBK_{i,t} = \frac{NTBK_{i,t-1} \times IPS_{i,t}}{100}$$

dimana :

- $NTBK_{i,t}$: Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kategori 'i' Pada Triwulan 't'
 $NTBK_{i,t-1}$: Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kategori 'i' Pada Triwulan Sebelumnya.
 $IPS_{i,t}$: Indeks Produksi Sub kategori 'i' Pada Triwulan 't' atau Indeks Penjualan Sub kategori 'i' Pada Triwulan 't'.
t : Triwulan Berjalan (t=1,2,3,4)

2.4.2. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

Untuk mendapatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dengan rumus sbb :

$$NTBB_{i,t} = \frac{NTBK_{i,t} \times IH_{i,t}}{100}$$

dimana:

$NTBB_{i,t}$: Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kategori 'i'
Pada Triwulan 't'

$IH_{i,t}$: Indeks Harga Sub kategori 'i' Pada Triwulan 't'

2.5. Cakupan

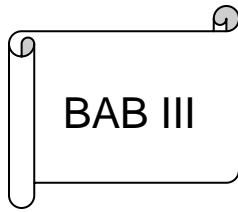
Penyusunan Buku Perkembangan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dengan menggunakan hasil Survei Ekonomi Daerah (SED) mempunyai cakupan antara lain :

1. Hanya dapat menghasilkan estimasi data indikator yang berupa *indeks* dan persentase.
2. Cakupan waktu survei adalah data realisasi Triwulan Berjalan yang hanya dicakup pada sepuluh minggu pertama sedangkan selebihnya diestimasi oleh responden. Untuk data triwulan sebelumnya adalah data realisasi, sedangkan data triwulan berikutnya merupakan data estimasi responden.

3

PEMBAHASAN





PEMBAHASAN

Hasil Survei Ekonomi Daerah (SED) Triwulan I Tahun 2017 adalah gambaran ekonomi makro di Kabupaten Ciamis, dimana pengaruh-pengaruh kejadian di dalam maupun luar negeri, cepat atau lambat akan berdampak ke daerah. Perekonomian Kabupaten Ciamis secara umum masih bertumpu kepada kategori dominan antara lain Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 26,56 persen; urutan kedua adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 21,78 persen, serta urutan ketiga adalah Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 13,95 persen (Tabel 3.1.). Ketiga kategori ini memberi kontribusi sebesar 62,28 persen. Dengan demikian apabila fokus pembangunan di Kabupaten Ciamis diarahkan pada ketiga kategori tersebut, maka akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kinerja perekonomian secara keseluruhan.

Pada Triwulan I Tahun 2017, kinerja perekonomian Kabupaten Ciamis mengalami perlambatan yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 0,19 persen, bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Triwulan IV Tahun 2016 yang mencapai 0,93 persen (Lampiran Tabel 6.). Hal ini dikarenakan menurunnya produksi pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, menurunnya produksi pada Kategori Industri Pengolahan, menurunnya produksi pada Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, menurunnya produksi pada Kategori Konstruksi, menurunnya produksi pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menurunnya produksi pada Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, dan menurunnya produksi pada Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

3.1. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 merupakan penyumbang terbesar terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis, hal ini menggambarkan bahwa Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan salah satu kategori andalan perekonomian Kabupaten Ciamis, sehingga pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari kontribusi Kategori Pertanian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku yaitu sebesar 26,56 persen (Lampiran Tabel 3.).

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2017 di Kabupaten Ciamis secara umum menunjukkan peningkatan kinerja dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7,38 persen (Lampiran Tabel 6.).

Hal ini terjadi dikarenakan Produksi padi sawah di Kabupaten Ciamis pada triwulan 1 mengalami peningkatan dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.1.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 (Persen)

Kategori	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
(1)	(2)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,56
2. Pertambangan dan Penggalan	0,13
3. Industri Pengolahan	7,25
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03
6. Konstruksi	6,62
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,78
8. Transportasi dan Pergudangan	13,95
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94
10. Informasi dan Komunikasi	2,49
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39
12. Real Estate	2,86
13. Jasa Perusahaan	0,78
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,50
15. Jasa Pendidikan	4,40
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84
17. Jasa lainnya	1,40
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (Diolah)

3.2. Kategori Pertambangan dan Penggalian

Secara umum kinerja Kategori Pertambangan dan Penggalian pada Triwulan I Tahun 2017 di Kabupaten Ciamis mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kategori Pertambangan dan Penggalian pada Triwulan I Tahun 2017 adalah negatif 5,41 persen (Lampiran Tabel 6.). Hal ini terjadi karena produksi penggalian tanah di Kabupaten Ciamis menurun.

Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 0,13 persen (Tabel 3.1.), kondisi ini masih jauh dibawah kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, hal ini menunjukkan bahwa Kategori Pertambangan dan Penggalian belum mampu mendongkrak perekonomian Kabupaten Ciamis.

3.3. Kategori Industri Pengolahan

Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan pada Triwulan I Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) di Kabupaten Ciamis mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dimana laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada Triwulan I Tahun 2017 adalah negatif 6,06 persen (Lampiran Tabel 6.).

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kategori Industri Pengolahan pada Triwulan I Tahun 2017 di Kabupaten Ciamis akan sangat berpengaruh terhadap kinerja Kategori tersebut terutama dalam mendukung perekonomian Kabupaten Ciamis. Salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan pada Triwulan I Tahun 2017 karena adanya penurunan produksi Industri Makanan dan Minuman, penurunan produksi Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, penurunan produksi Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, penurunan produksi Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, penurunan produksi Industri Furnitur dan penurunan produksi Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan di Kabupaten Ciamis.

Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 7,25 persen (Lampiran Tabel 3.).

3.4. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 pada Triwulan I Tahun 2017 adalah negatif 13,51 persen lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 6.). Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) ini karena menurunnya pemakaian Kategori Pengadaan Listrik dan Gas oleh rumah tangga.

Kontribusi Kategori Pengadaan Listrik dan Gas ini pada Triwulan I Tahun 2017 terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis mencapai 0,09 persen (Tabel 3.1.).

3.5. Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 secara umum mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 1,60 persen lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 6.). Percepatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) ini karena meningkatnya pemakaian Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Kontribusi Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ini pada Triwulan I Tahun 2017 terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis mencapai 0,03 persen (Tabel 3.1.).

3.6. Kategori Konstruksi

Pada Triwulan I Tahun 2017 Kategori Konstruksi di Kabupaten Ciamis mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu negatif 9,14 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 6.). Hal ini terjadi dikarenakan pada Triwulan I kegiatan pembangunan oleh pemerintah masih banyak yang belum dimulai.

Kontribusi Kategori Konstruksi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 6,62 persen (Tabel 3.1.).

3.7. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu negatif 1,19 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 21,78 persen lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

Kategori ini merupakan penyumbang kedua terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017, hal ini menggambarkan bahwa Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga merupakan salah satu kategori andalan perekonomian Kabupaten Ciamis.

3.8. Kategori Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu 0,07 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Transportasi dan Pergudangan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 sebesar 13,95 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

Kategori ini merupakan penyumbang ketiga terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017, hal ini menggambarkan bahwa Kategori Transportasi dan Pergudangan juga merupakan salah satu kategori andalan perekonomian Kabupaten Ciamis.

3.9. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu 0,28 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 3,94 persen lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4.0. Kategori Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi ini secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu 1,39 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Informasi dan Komunikasi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 2,49 persen lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4.1. Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu negatif 1,77 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 3,39 persen lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4.2. Kategori Real Estate

Kategori Real Estate secara umum mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 4,73 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Real Estate terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 2,86 persen lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4.3. Kategori Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu 0,78 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Jasa Perusahaan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 sama dengan triwulan sebelumnya yaitu 0,78 persen (Lampiran Tabel 3.).

4.4. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu negatif 6,32 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 3,50 persen lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4.5. Kategori Jasa Pendidikan

Kategori Jasa Pendidikan secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu 1,18 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Jasa Pendidikan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 4,40 persen lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4.6. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial secara umum mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yaitu 0,20 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 0,84 persen sama dengan triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4.7. Kategori Jasa Lainnya

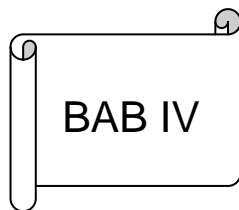
Kategori Jasa Lainnya secara umum mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 0,28 persen (Lampiran Tabel 6.).

Kontribusi Kategori Jasa Lainnya terhadap struktur perekonomian Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 1,40 persen lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Lampiran Tabel 3.).

4

KESIMPULAN





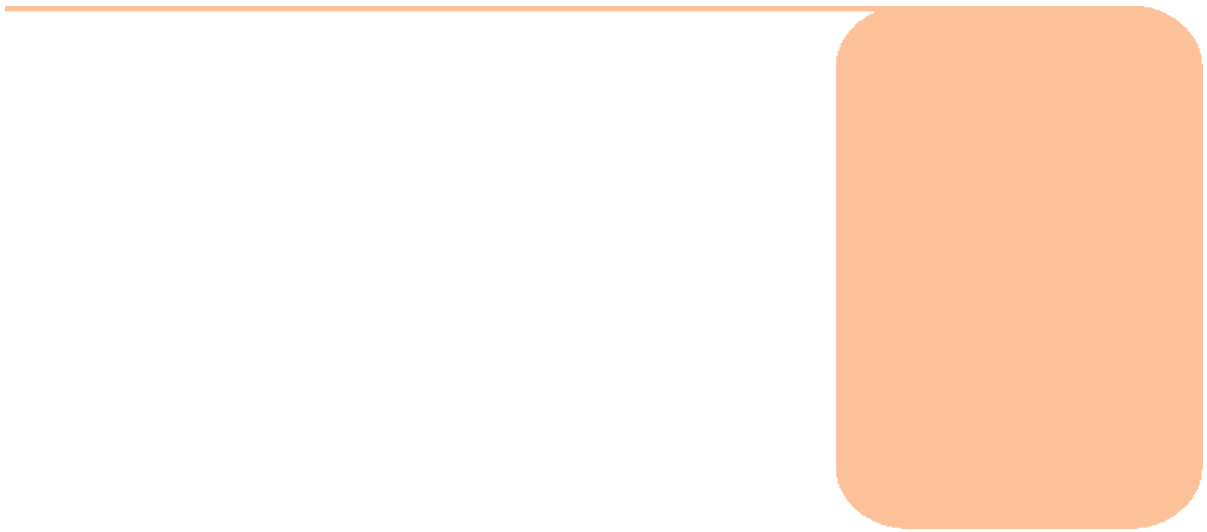
BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Daerah (SED) pada Triwulan I Tahun 2017 bahwa kondisi perekonomian secara makro di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada Triwulan I Tahun 2017 Kabupaten Ciamis mengalami perlambatan sebesar 0,19 persen, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,93 persen (Lampiran Tabel 6.).
2. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga berlaku pada Triwulan I Tahun 2017 Kabupaten Ciamis mengalami percepatan sebesar 1,16 persen (Lampiran Tabel 5.).
3. Perekonomian Kabupaten Ciamis di bidang ekonomi pada Triwulan I Tahun 2017, pembangunan Kabupaten Ciamis secara umum masih bertumpu kepada kategori dominan antara lain Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 26,56 persen; urutan kedua adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 21,78 persen, serta urutan ketiga adalah Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 13,95 persen, sedangkan kontribusi terkecil adalah Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mencapai 0,03 persen (Lampiran Tabel 3.).

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,533,351.40	1,662,758.02
B	Pertambangan dan Penggalian	8,677.14	8,261.73
C	Industri Pengolahan	478,070.26	453,634.14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,188.64	5,435.87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,707.38	1,761.96
F	Konstruksi	448,920.35	414,319.39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,373,480.65	1,363,360.83
H	Transportasi dan Pergudangan	867,016.37	873,007.16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244,959.31	246,649.75
J	Informasi dan Komunikasi	152,535.23	155,598.57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	214,710.65	212,209.83
L	Real Estate	168,524.12	179,280.21
M,N	Jasa Perusahaan	47,996.18	48,856.56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231,705.68	219,181.58
P	Jasa Pendidikan	271,322.53	275,568.77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,155.28	52,522.17
R,S,T,U	Jasa lainnya	87,126.77	87,893.98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,188,447.93	6,260,300.51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6,188,447.93	6,260,300.51

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,022,590.50	1,098,025.58
B	Pertambangan dan Penggalian	9,009.97	8,522.42
C	Industri Pengolahan	366,897.34	344,673.08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,216.12	2,781.73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,301.78	1,322.64
F	Konstruksi	343,930.08	312,484.09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,073,870.30	1,061,039.76
H	Transportasi dan Pergudangan	577,835.12	578,260.54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188,347.32	188,873.30
J	Informasi dan Komunikasi	162,169.68	164,417.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	159,384.17	156,570.84
L	Real Estate	147,945.95	154,940.58
M,N	Jasa Perusahaan	38,305.84	38,604.81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	156,897.21	146,981.30
P	Jasa Pendidikan	213,127.42	215,637.78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,814.37	41,897.99
R,S,T,U	Jasa lainnya	71,239.38	71,436.84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,577,882.55	4,586,471.09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		4,577,882.55	4,586,471.09

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.78	26.56
B	Pertambangan dan Penggalian	0.14	0.13
C	Industri Pengolahan	7.73	7.25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03
F	Konstruksi	7.25	6.62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.19	21.78
H	Transportasi dan Pergudangan	14.01	13.95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.96	3.94
J	Informasi dan Komunikasi	2.46	2.49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.47	3.39
L	Real Estate	2.72	2.86
M,N	Jasa Perusahaan	0.78	0.78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.74	3.50
P	Jasa Pendidikan	4.38	4.40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.84	0.84
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.41	1.40
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	100.00	100.00

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.34	23.94
B	Pertambangan dan Penggalian	0.20	0.19
C	Industri Pengolahan	8.01	7.51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03
F	Konstruksi	7.51	6.81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.46	23.13
H	Transportasi dan Pergudangan	12.62	12.61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.11	4.12
J	Informasi dan Komunikasi	3.54	3.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.48	3.41
L	Real Estate	3.23	3.38
M,N	Jasa Perusahaan	0.84	0.84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.43	3.20
P	Jasa Pendidikan	4.66	4.70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.91	0.91
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.56	1.56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100.00	100.00

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(3,89)	8.44
B	Pertambangan dan Penggalian	0.83	(4,79)
C	Industri Pengolahan	1.29	(5,11)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(2,04)	(12,16)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(8,94)	3.20
F	Konstruksi	(0,99)	(7,71)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.21	(0,74)
H	Transportasi dan Pergudangan	4.86	0.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.06	0.69
J	Informasi dan Komunikasi	2.36	2.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	(1,43)	(1,16)
L	Real Estate	(0,73)	6.38
M,N	Jasa Perusahaan	3.43	1.79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(3,19)	(5,41)
P	Jasa Pendidikan	6.15	1.57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.38	0.70
R,S,T,U	Jasa lainnya	(9,29)	0.88
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	0.91	1.16
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	0.91	1.16

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(3,94)	7.38
B	Pertambangan dan Penggalian	0.20	(5,41)
C	Industri Pengolahan	0.45	(6,06)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(2,78)	(13,51)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(9,87)	1.60
F	Konstruksi	(0,01)	(9,14)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.31	(1,19)
H	Transportasi dan Pergudangan	4.86	0.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.70	0.28
J	Informasi dan Komunikasi	2.36	1.39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	(1,45)	(1,77)
L	Real Estate	(1,79)	4.73
M,N	Jasa Perusahaan	2.29	0.78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.54	(6,32)
P	Jasa Pendidikan	5.82	1.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.16	0.20
R,S,T,U	Jasa lainnya	(9,49)	0.28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		0.93	0.19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		0.93	0.19

**Tabel 7. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017
Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100)**

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	149.95	151.43
B	Pertambangan dan Penggalian	96.31	96.94
C	Industri Pengolahan	130.30	131.61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	192.43	195.41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	131.16	133.22
F	Konstruksi	130.53	132.59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	127.90	128.49
H	Transportasi dan Pergudangan	150.05	150.97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130.06	130.59
J	Informasi dan Komunikasi	94.06	94.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134.71	135.54
L	Real Estate	113.91	115.71
M,N	Jasa Perusahaan	125.30	126.56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	147.68	149.12
P	Jasa Pendidikan	127.31	127.79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.73	125.36
R,S,T,U	Jasa lainnya	122.30	123.04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		135.18	136.49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		135.18	136.49

Tabel 8. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2017 Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100) (Persen)

Kategori	Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.05	0.99
B	Pertambangan dan Penggalian	0.63	0.66
C	Industri Pengolahan	0.84	1.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.76	1.55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.04	1.57
F	Konstruksi	(0,89)	1.58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.86	0.46
H	Transportasi dan Pergudangan	0.01	0.62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.36	0.41
J	Informasi dan Komunikasi	0.01	0.61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.01	0.61
L	Real Estate	1.08	1.58
M,N	Jasa Perusahaan	1.12	1.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(4,67)	0.98
P	Jasa Pendidikan	0.32	0.38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21	0.50
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.23	0.60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		(0,02)	0.97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		(0,02)	0.97